

PENGARUH KESEMPATAN KERJA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENGANGGURAN DAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Putu Ayu Wulan Nanda Erayanti¹

Ni Nyoman Reni Suasih²

^{1,2}FakultasEkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Salah satu isu ekonomi yang kerap timbul adalah tantangan kemiskinan yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan sangat terlihat dengan banyaknya penduduk yang menganggur. Individu yang hidup dalam kemiskinan serta mereka yang menghadapi pengangguran umumnya menghadapi kesulitan dalam meraih peluang pekerjaan, keterbatasan dalam mengembangkan bisnis, perbedaan pendapatan, dan kurangnya perlindungan dalam dunia kerja, terutama bagi perempuan, juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Studi ini mempunyai tujuan menganalisis kesempatan kerja dan upah minimum terhadap pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode tahun 2012-2021. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yang mencakup 9 Kabupaten/Kota. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran namun upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. 2) Kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan namun upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 3) Kesempatan kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran namun upah minimum berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran.

Kata kunci: Kesempatan Kerja, Upah Minimum, Pengangguran, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

One of the recurring economic issues is the challenge of poverty faced by various countries worldwide, including Indonesia. Poverty is evident through a high number of unemployed individuals. Those living in poverty and those facing unemployment generally encounter difficulties in accessing job opportunities, limited business development, income disparities, and lack of workplace protections, especially for women. These issues also affect economically disadvantaged groups in society. This study aims to analyze the impact of job opportunities and minimum wage on unemployment and poverty rates in the Regencies/Cities of Bali Province. The research utilizes secondary data from the period 2012-2021. The study covers 9 Regencies/Cities within Bali Province. Path Analysis is the employed analytical technique. The findings of this research indicate that: 1) Job opportunities have a significant negative impact on unemployment, while minimum wage has a significant positive impact on unemployment. 2) Job opportunities have a positive but insignificant impact on the poverty rate, while minimum wage has a

significant negative impact on the poverty rate. Unemployment, on the other hand, has a positive but insignificant impact on the poverty rate. 3) Job opportunities do not have a direct impact on the poverty rate through unemployment, whereas minimum wage directly affects the poverty rate through unemployment.

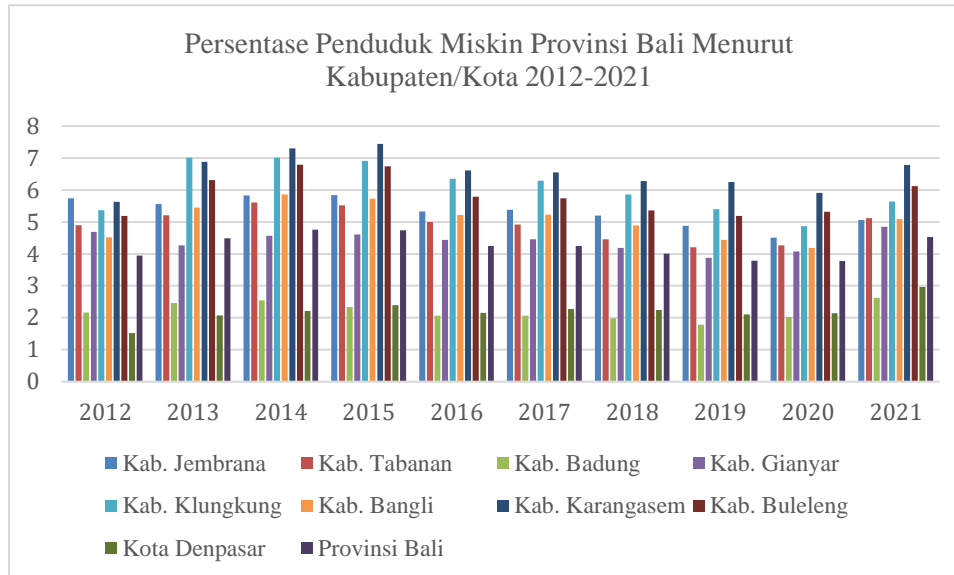
Keyword: *Employment Opportunity, Minimum Wage, Unemployment, Poverty Rate.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang sangat serius dan menjadi perhatian daerah. Kemiskinan kini tak hanya dilihat sebagai aspek ekonomi semata, tetapi juga telah merambah ke berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, politik dan pendidikan (Budhi, 2013). Kemiskinan dapat dikatakan suatu masalah yang sejalan dengan umur manusia itu sendiri dan dalam implikasi masalahnya melibatkan semua aspek dalam kehidupan manusia, walaupun kehadirannya itu banyak kali tidak disadari sebagai suatu masalah oleh masyarakat yang tergolong miskin (Suliswanto, 2010). Masyarakat miskin dikenal dengan lemah dalam hal berusaha dan dalam hal ekonomi sangat terbatas sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai akses yang lebih baik (Nurwati, 2008).

Selain itu adapun faktor lainnya yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia tinggi dipandang dari sisi ekonomi yaitu rendahnya sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya dalam menempuh pendidikan (Jonaidi, 2012). Kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang digunakan pemerintah. Dalam menjalankan kebijakan ini membutuhkan informasi yang akurat seperti penyebaran secara geografis maupun karakteristik dari rumah tangganya seperti jumlah anggota keluarga, umur kepala keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tingkat kemiskinan di Indonesia tidak terdistribusi secara seragam, melainkan beberapa wilayah provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, sementara beberapa provinsi lainnya mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Provinsi Bali merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Menjadi penting bagi seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam tanggung jawab, terutama bagi pemerintah sebagai motor perubahan dalam meningkatkan kondisi masyarakat, dengan upaya segera mencari solusi sebagai langkah konkret dalam menanggulangi isu kemiskinan

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2012-2021

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa kemiskinan di Provinsi Bali mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kemiskinan tertinggi di Provinsi Bali terjadi pada tahun 2015 mencapai 7,44 persen sedangkan kemiskinan terendah pada tahun 2012 mencapai 1,52 persen. Rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Bali tahun 2012-2021 mencapai 4,25 persen. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota tingkat kemiskinan paling tinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Badung memiliki persentase tingkat kemiskinan paling rendah diantara Kabupaten/Kota lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersama-sama bertanggung jawab, terutama pemerintah sebagai pihak yang bertugas memfasilitasi perbaikan kualitas hidup masyarakat, dengan mengambil langkah cepat dalam mencari solusi guna mengatasi tantangan kemiskinan.

Agar tingkat kemiskinan menurun, langkah yang diperlukan adalah mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu akibat dari kegagalan pembangunan dalam suatu negara adalah peningkatan tingkat pengangguran, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah populasi pekerja dengan peluang kerja yang tersedia. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Bali tahun 2012-2021 persentase pengangguran di Provinsi Bali yang tertinggi berada di Kabupaten Gianyar sebesar 7,53 persen pada tahun 2020 dan persentase pengangguran yang terendah berada di Kabupaten Badung pada tahun 2015. Tingginya angka pengangguran pada

tahun 2020 disebabkan karena munculnya pandemi covid-19 sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Individu yang hidup dalam kemiskinan serta mereka yang menghadapi pengangguran umumnya mengalami kesulitan dalam meraih peluang pekerjaan, terbatasnya potensi dalam membangun bisnis, disparitas upah, dan kekurangan perlindungan kerja, terutama bagi pekerja perempuan, juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh komunitas miskin (Astrini, 2013). Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Bali tahun 2012-2021 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar pada tahun 2018 yaitu sebesar 526.484 orang Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja paling rendah diantara Kabupaten/Kota lainnya pada tahun 2012 sebesar 96.527 orang. Rendahnya partisipasi anggota populasi yang berusia 15 tahun ke atas di sektor pekerjaan terjadi karena adanya keterbatasan dalam peluang kerja dan rendahnya kualitas SDM, sehingga keterbatasan dalam kapasitas untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jika lebih banyak individu terlibat dalam kegiatan pekerjaan, maka kesempatan kerja akan semakin melebar.

Selain kesempatan kerja yang menurun, kemiskinan di Provinsi Bali disebabkan karena tingkat upah yang rendah. Upah minimum adalah titik terendah dalam skala upah yang dijadikan pedoman oleh perusahaan untuk menetapkan jumlah gaji yang sebenarnya diberikan kepada pekerja atau buruh yang sedang bekerja. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Bali tahun 2012-2021 besaran upah minimum tertinggi yaitu Kabupaten Badung pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.930.093 dan posisi tertinggi kedua yaitu Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar 2.770.300 dibanding wilayah lainnya di Provinsi Bali, dan upah minimum terendah yaitu pada Kabupaten Bangli pada tahun 2021 sebesar 2.494.810. Penerimaan upah yang rendah oleh warga memiliki dampak terhadap pendapatan yang minim dalam komunitas di suatu wilayah, sehingga pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Upah menjadi faktor yang memainkan peran dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, dimana kenaikan upah minimum bisa berpotensi menurunkan permintaan akan tenaga kerja. Di sisi lain, bagi pekerja, upah adalah penghargaan yang patut diberikan sebagai imbalan atas upaya dan waktu yang diinvestasikan (Mankiw, 2000: 140).

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut, kesempatan kerja dan upah minimum berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Kesempatan kerja, upah minimum dan pengangguran berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, serta kesempatan kerja dan upah minimum berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel X_1 yaitu kesempatan kerja memiliki nilai minimum sebesar 96527.00 dan nilai maksimum 526484.0. Dengan rata-rata 263464.8 dan standar deviasi 115546.7. Nilai yang melebihi deviasi standar memperlihatkan jika sebaran data pada variabel dalam kategori baik. Variabel X_2 yaitu upah minimum memiliki nilai minimum sebesar 970000.0 dan nilai maksimum 2930093. Dengan rata-rata 1948718 dan standar deviasi 533223.7. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan jika varians data dalam variabel memiliki varians yang tinggi. Variabel Y_1 yaitu pengangguran memiliki nilai minimum sebesar 0.340 dan nilai maksimum 7.620. Dengan rata-rata 2.289 dan standar deviasi 1.748. Nilai yang melebihi deviasi standar memperlihatkan jika sebaran data dalam variabel dalam kategori baik. Variabel Y_2 yaitu tingkat kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 1.400 dan nilai maksimum 7.440. Dengan rata-rata 4.728 dan standar deviasi sebesar 1.580. Nilai rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan jika sebaran data dalam variabel dalam kategori baik.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda Struktur 1

Dependent Variable: Y1
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/28/23 Time: 13:11
 Sample: 2012 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 9
 Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.359597	2.788562	1.921993	0.0582
X1	-2.54E-05	1.19E-05	-2.135936	0.0358
X2	1.85E-06	3.62E-07	5.126177	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.380049	Mean dependent var	2.289556
Adjusted R-squared	0.301575	S.D. dependent var	1.748371
S.E. of regression	1.461146	Akaike info criterion	3.710402
Sum squared resid	168.6609	Schwarz criterion	4.015934
Log likelihood	-155.9681	Hannan-Quinn criter.	3.833611
F-statistic	4.842949	Durbin-Watson stat	0.903023
Prob(F-statistic)	0.000020		

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2023

$$Y_1 = 5,359597 - 0,0000254(X_1) + 0,00000185(X_2)$$

Persamaan regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 5,359597 artinya jika kesempatan kerja dan upah minimum bernilai konstan maka pengangguran akan bernilai sebesar 5,359597.
- Koefisien regresi variabel kesempatan kerja sebesar $-0,0000254$ artinya jika variabel kesempatan kerja meningkat maka variabel pengangguran akan menurun sebesar $-0,0000254$. Hal ini menunjukkan jika variabel kesempatan kerja memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran.
- Koefisien regresi variabel upah minimum sebesar $0,00000185$ artinya jika variabel upah minimum meningkat maka variabel pengangguran akan meningkat sebesar $0,00000185$. Hal ini menunjukkan jika variabel upah minimum memiliki hubungan positif terhadap pengangguran.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda Struktur 2

Dependent Variable: Y2
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/05/23 Time: 18:41
 Sample: 2012 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 9
 Total panel (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.323467	0.946620	4.567266	0.0000
X1	4.48E-06	4.05E-06	1.105281	0.2724
X2	-4.57E-07	1.39E-07	-3.299897	0.0015
Y1	0.050645	0.037330	1.356690	0.1788

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.917536	Mean dependent var	4.728667
Adjusted R-squared	0.905906	S.D. dependent var	1.580467
S.E. of regression	0.484803	Akaike info criterion	1.513420
Sum squared resid	18.33268	Schwarz criterion	1.846727
Log likelihood	-56.10388	Hannan-Quinn criter.	1.647829
F-statistic	78.89690	Durbin-Watson stat	1.220721
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2023

$$Y_2 = 4,323467 + 0,00000448(X_1) - 0,000000457(X_2) + 0,050645(Y_1)$$

Persamaan regresi data panel tersebut dapat dijadikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 4,323467 artinya jika kesempatan kerja, upah minimum, dan pengangguran bernilai konstan maka tingkat kemiskinan akan bernilai sebesar 4,32.
- Koefisien regresi variabel kesempatan kerja sebesar 0,00000448 artinya jika variabel kesempatan kerja meningkat maka variabel tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,00000448. Hal ini menunjukkan jika variabel kesempatan kerja memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan.
- Koefisien regresi variabel upah minimum sebesar - 0,000000457 artinya jika variabel upah minimum meningkat maka variabel pengangguran akan menurun sebesar - 0,000000457. Hal ini menunjukkan jika variabel upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran.
- Koefisien regresi variabel pengangguran sebesar 0,05 artinya jika variabel pengangguran meningkat maka variabel tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan jika variabel pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 5. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total antar Variabel

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Pengangguran (Y1) ($\beta_1 \times \beta_3$)	Pengaruh Total
$X_1 \rightarrow Y_1$	-1,678	-	-1,678
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,564	-	0,564
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,327	-0,093	0,234
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,154	0,031	-0,123
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,056	-	0,056

Sumber: Data Diolah

Dalam Tabel 5, ditemukan beberapa pengaruh langsung variabel terhadap variabel lainnya. Variabel X_1 memiliki pengaruh langsung terhadap Y_1 sebesar -1,678, sementara variabel X_2 memengaruhi Y_1 dengan nilai 0,564. Terhadap variabel Y_2 , X_1 memberikan pengaruh langsung sebesar 0,327, dan X_2 memiliki dampak sebesar -0,154. Selain itu, terdapat pengaruh langsung Y_1 terhadap Y_2 sebesar 0,056. Pengaruh tidak langsung juga terlihat, seperti pengaruh tidak langsung X_1 terhadap Y_2 melalui Y_1 , dihitung dari hasil perkalian -1,678 x 0,056, yang menghasilkan -0,093. Begitu pula, pengaruh tidak langsung X_2 terhadap Y_2 melalui Y_1 dihitung dengan hasil perkalian 0,564 x 0,056, yang setara dengan 0,031..

Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kesempatan kerja terhadap pengangguran menunjukkan nilai probabilitas 0,0358 dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,0000254. Nilai probabilitas 0,0358 < 0,05 menunjukkan jika kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Setiap penambahan satu orang yang bekerja menyebabkan penurunan pada jumlah pengangguran sebanyak 0,0000254 persen di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Hasil studi yang dilakukan oleh Hardini (2017) menyimpulkan bahwa perubahan dalam peluang kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, di mana arah hubungan tersebut adalah negatif. Ini mengindikasikan bahwa jika kesempatan kerja meningkat, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, jika kesempatan kerja menurun, maka tingkat pengangguran berpotensi meningkat.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil analisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,00000185. Nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ menunjukkan jika upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Setiap kenaikan satu rupiah pada upah minimum menyebabkan peningkatan pada jumlah pengangguran sebanyak 0,00000185 persen di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum memiliki dampak positif terhadap rata-rata upah pekerja. Melalui pengaruh rata-rata upah pekerja ini, upah minimum juga memengaruhi tingkat pengangguran. Dengan kata lain, ketika upah minimum naik, tingkat pengangguran cenderung meningkat sebagai akibatnya. Berdasarkan hasil penelitian dari Panjawa dan Soebagiyo (2014) menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, dimana dengan adanya kenaikan upah minimum akan menyebabkan peningkatan pengangguran.

Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai probabilitas 0,2724 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,00000448. Nilai probabilitas $0,2724 > 0,05$ menunjukkan jika kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan satu orang yang bekerja menyebabkan peningkatan pada tingkat kemiskinan sebanyak 0,00000448 persen di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Berdasarkan pandangan Ariska dan Sentosa (2021), mereka menyatakan bahwa hubungan antara kesempatan kerja dan kemiskinan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Meskipun peluang pekerjaan ada, namun hal ini belum mampu secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Faktor-faktor seperti keterbatasan lapangan pekerjaan yang masih rendah dan pertumbuhan populasi yang terus berlanjut berkontribusi pada peningkatan pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat memperburuk masalah kemiskinan karena banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai probabilitas 0,0015 dengan nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,000000457. Nilai probabilitas $0,0015 < 0,05$ menunjukkan jika upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan satu rupiah pada upah minimum menyebabkan penurunan pada tingkat kemiskinan sebanyak 0,000000457 persen di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Dari temuan studi yang dilaksanakan oleh Aprilia (2016), ditemukan bahwa hubungan antara upah minimum dan tingkat kemiskinan memiliki dampak yang signifikan. Lebih lanjut, semakin tinggi upah minimum memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Keputusan untuk menetapkan upah minimum yang mendekati atau melebihi KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) serta melampaui ambang batas kemiskinan terbukti tepat karena mampu mengurangi angka kemiskinan. Sesuai dengan hasil wawancara mendalam pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Ibu Sri Astuti yang bekerja sebagai pegawai Dinas Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali, beliau berpendapat bahwa:

“Upah minimum lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini terjadi karena, dalam kehidupan sehari-hari selain pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, inflasi pasti terus meningkat itulah yang menyebabkan tingkat upah terus meningkat. Contohnya pada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang memiliki upah minimum tertinggi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang selalu tinggi serta dilihat dari sektor pariwisata, hotel, ataupun restoran memang lebih banyak terdapat di Kabupaten Badung. Dengan adanya kenaikan pada tingkat upah maka dapat menurunkan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat upah dapat membantu menurunkan kemiskinan. Para pekerja yang menerima upah yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akan terhindar oleh kemiskinan itu sendiri. Kenaikan tingkat upah juga bisa dilihat dari kemampuan perusahaan dan tidak mengesampingkan kesejahteraan para pekerja agar dapat mengurangi kemiskinan.”

Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai probabilitas 0,1788 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,050645. Nilai probabilitas $0,1788 > 0,05$ menunjukkan jika pengangguran berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan satu persen pada jumlah pengangguran menyebabkan penurunan pada tingkat kemiskinan sebanyak 0,050645 persen di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Dalam penelitian Giovani (2018), disimpulkan bahwa hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak begitu kuat. Individu yang mengalami pengangguran tidak selalu menjadi kelompok miskin, terutama jika anggota keluarga lain memiliki penghasilan yang tinggi. Pengangguran dalam rumah tangga tidak selalu mengakibatkan kemiskinan, karena adanya pendapatan mencukupi dari anggota keluarga lainnya yang dapat menjaga keluarga di atas ambang batas kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali namun upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali namun upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Kesempatan kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali namun upah minimum berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat diusulkan bahwa upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diwujudkan melalui ekspansi kesempatan kerja. Untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja, sangat penting untuk menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, perlunya ditingkatkan pemberian kesempatan kerja yang sesuai dengan potensi unik yang ada di setiap wilayah. Pemberlakuan upah minimum harus dipertahankan, dan jumlahnya minimal harus mencukupi untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum (KHM) atau standar kebutuhan hidup yang layak (KHL) guna melindungi hak-hak para pekerja. Harapannya, melalui penerapan upah minimum, pekerja dapat memperoleh gaji yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup yang layak, sehingga terhindar dari tingkat kemiskinan.

REFERENSI

- Anonimous. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Anonimous. (2020). *Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Anonimous. (2021). *Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang), 2019-2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Anonimous. (2021). *Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Rupiah), 2018-2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Ariska, S., & Sentosa, S. U. (2021). Pengaruh inflasi, pendidikan dan upah terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(3), 77-88.
- Arndt, H. W. dan Sundrum, R. M. (2012). *Employment, Unemployment and Under- Employment. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 16 (3), hal. 61 – 82.
- Astrini, Myanti dan Purbadharmaja, IB Putu. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(8): 384-392.
- Budhi, Made Kembar Sri. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 1-6.
- Giovanni, R. (2018). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. *Economics Development analysis journal*, 7(1), 23-31.
- Hardini, M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan kesempatan kerja terhadap tingkat Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(1), 1-5.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1 (1), 140-164.
- Mankiw. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro. Edisi Asia Volume 1*. Jakarta: Penerbitan Salemba Empat.
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan*. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1.
- Panjawa, J. L., & Soebagiyo, D. (2014). Efek peningkatan upah minimum terhadap tingkat pengangguran. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(1), 48-54.
- Suliswanto, M.S.W. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 (2), 358-366.